

FAKTOR PEMICU DAN POLA PERKEMBANGAN KONFLIK BERSENJATA DI AFRIKA TIMUR: PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL

Annisatur Rahmah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

12311321082@students.uin-suska.ac.id

Adhi Munanjar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Konflik bersenjata di Afrika Timur merupakan salah satu persoalan keamanan regional yang paling kompleks di dunia, terutama karena melibatkan berbagai aktor, faktor internal, dan kepentingan eksternal. Artikel ini membahas faktor pemicu dan pola perkembangan konflik bersenjata di Afrika Timur melalui perspektif Hubungan Internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah berbagai penelitian, laporan organisasi internasional, dan sumber ilmiah terkini. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa konflik di Afrika Timur tidak hanya dipicu oleh persoalan domestik seperti ketegangan etnis, perebutan sumber daya, dan rapuhnya institusi negara, tetapi juga diperkuat oleh intervensi eksternal, kompetisi geopolitik, dan dinamika keamanan regional yang saling terkait. Temuan menunjukkan bahwa pola perkembangan konflik bersifat siklik, lintas batas (spillover), serta dipengaruhi semakin kuatnya aktor non-negara bersenjata. Dengan menggunakan teori realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, artikel ini menegaskan bahwa konflik Afrika Timur hanya dapat dipahami secara komprehensif melalui pendekatan multi-level. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan analisis keamanan regional serta rekomendasi bagi upaya penyelesaian konflik di kawasan tersebut
Kata Kunci: Afrika Timur, konflik bersenjata, keamanan regional, faktor pemicu, Hubungan Internasional.

Abstract

The armed conflict in East Africa is one of the world's most complex regional security issues, primarily due to the involvement of multiple actors, internal factors, and external interests. This article examines the triggers and development patterns of armed conflict in East Africa from an international relations perspective. This research employs a literature review method, reviewing various studies, international organization reports, and recent scholarly sources. The main argument of this study is that the conflict in East Africa is not only triggered by domestic issues such as ethnic tensions, resource struggles, and the fragility of state institutions, but is also amplified by external intervention, geopolitical competition, and interconnected regional security dynamics. The findings indicate that the pattern of conflict development is cyclical, spillover, and influenced by the growing strength of armed non-state actors. Using the theories of realism, liberalism, and constructivism, this article asserts that the East African conflict can

only be comprehensively understood through a multi-level approach. This study is expected to contribute to the development of regional security analysis and recommendations for conflict resolution efforts in the region.

Keywords: East Africa, armed conflict, regional security, triggering factors, International Relations.

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata di Afrika Timur merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami hanya melalui satu dimensi saja. Kawasan ini selalu berada dalam kondisi rentan karena adanya perpaduan antara warisan sejarah kolonial, fragmentasi identitas, kelemahan institusi negara, dan kepentingan geopolitik global. Berbagai negara di kawasan seperti Somalia, Ethiopia, Sudan, Eritrea, dan Sudan Selatan menghadapi persoalan keamanan yang tidak hanya bersifat domestik tetapi juga berlapis dan melibatkan aktor eksternal. Hal inilah yang menyebabkan konflik di Afrika Timur bersifat berulang, sulit diselesaikan, dan sering berubah bentuk seiring waktu. Pendekatan multidisipliner menjadi penting karena konflik tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada struktur sosial, politik, dan ekonomi yang panjang.

Secara historis, konflik di wilayah ini juga terkait erat dengan proses pembentukan negara modern yang berlangsung di bawah pengaruh kolonialisme. Perbatasan negara yang ditentukan oleh kekuatan kolonial Eropa tanpa mempertimbangkan kesatuan etnis dan sosial menjadikan banyak kelompok terpecah dan tersebar di berbagai negara. Akibatnya, ketegangan identitas menjadi salah satu sumber konflik yang tidak pernah benar-benar terselesaikan. Peristiwa-peristiwa seperti Perang Ogaden, konflik Eritrea–Ethiopia, dan perang saudara Somalia menunjukkan bagaimana batas-batas politik yang ditetapkan kolonial telah menciptakan negara yang sulit diintegrasikan secara nasional. Kesulitan tersebut diperburuk oleh kebijakan pascakolonial yang sering kali bersifat eksklusif dan tidak mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat.

Selain faktor sejarah, dinamika internal setiap negara di Afrika Timur juga memainkan peran penting. Pemerintahan di banyak negara kawasan ini menghadapi masalah serius dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Kelemahan birokrasi, korupsi, kurangnya pelayanan publik, dan minimnya legitimasi politik membuat negara rentan terhadap konflik internal. Dalam beberapa kasus, negara bahkan gagal menjalankan fungsi dasar seperti menjaga keamanan dan menyediakan pelayanan publik. Somalia merupakan contoh paling jelas dari situasi negara gagal, di mana selama puluhan tahun pemerintah pusat tidak memiliki kendali penuh terhadap wilayah nasional. Hal ini membuka ruang bagi milisi lokal, kelompok jihad, dan aktor eksternal yang turut

memperburuk konflik.

Salah satu aspek penting dalam memahami konflik di Afrika Timur adalah kondisi negara yang lemah atau failed state. Rotberg (2004) menjelaskan bahwa negara dengan institusi politik yang tidak berfungsi secara efektif cenderung mengalami kekerasan internal dan kesulitan mempertahankan stabilitas keamanan. Somalia, misalnya, kehilangan otoritas pemerintah sejak tahun 1991 dan hingga kini masih berjuang menghadapi kelompok bersenjata seperti Al-Shabaab. Kondisi serupa juga terlihat di Sudan Selatan, di mana pemerintahan baru pasca-kemerdekaan tidak mampu mengelola keragaman sosial dan politik secara efektif (Johnson 2016).

Selain faktor kelemahan negara, dinamika identitas dan etnis juga memainkan peran penting dalam memicu konflik. Konflik Tigray di Ethiopia yang dipaparkan oleh Abbink (2022) menunjukkan bahwa persaingan antara kelompok etnis dapat dengan cepat berubah menjadi perang terbuka ketika kesenjangan politik dan ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan kelompok daerah semakin melebar. Persoalan identitas ini seringkali diperparah oleh narasi sejarah dan memori kolektif yang diwariskan antar generasi, sehingga menciptakan konflik yang bersifat emosional dan sulit diselesaikan melalui kompromi politik.

Di sisi lain, faktor ekonomi dan sumber daya turut memperburuk ketegangan di Afrika Timur. De Waal (2018) menegaskan bahwa kelaparan dan krisis pangan di kawasan ini bukan hanya hasil bencana alam, tetapi juga akibat dari keputusan politik yang buruk. Ketimpangan akses terhadap sumber daya seperti air, lahan subur, dan minyak bumi telah melahirkan kompetisi yang keras antar kelompok masyarakat. Konflik di Sudan Selatan, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari perebutan wilayah minyak yang menjadi sumber devisa utama negara. Ketika sumber daya menjadi alat kekuasaan, konflik pun berkembang lebih intens.

Dinamika ekonomi juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Ketimpangan ekonomi yang tinggi, ketergantungan pada sumber daya alam tertentu, serta minimnya lapangan pekerjaan menciptakan kondisi sosial yang tidak stabil. Banyak masyarakat terpaksa bergabung dengan kelompok bersenjata bukan karena ideologi, melainkan karena alasan ekonomi dan kebutuhan bertahan hidup. Sumber daya strategis seperti minyak di Sudan Selatan dan gas di Somalia menjadi komoditas yang diperebutkan oleh elite politik maupun kelompok milisi. Selain itu, perubahan iklim memperburuk kondisi ekonomi, terutama bagi masyarakat pastoral yang bergantung pada ketersediaan padang rumput dan air. Kekeringan

berkepanjangan telah memicu bentrokan antara kelompok petani dan penggembala, memperluas intensitas konflik lokal.

Dari sisi geopolitik, Afrika Timur memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional, terutama melalui Laut Merah dan Teluk Aden. Kawasan ini menjadi jalur penting bagi rute pelayaran global yang menghubungkan Asia dan Eropa. Karena itu, berbagai negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Turki, dan negara-negara Teluk memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang kuat di kawasan ini. Kehadiran pangkalan militer asing di Djibouti, misalnya, mencerminkan bagaimana Afrika Timur telah menjadi arena persaingan kekuatan besar. Intervensi eksternal, baik dalam bentuk dukungan politik, pendanaan militer, maupun pelatihan kelompok lokal, turut mempengaruhi dinamika konflik dan membuatnya semakin sulit diselesaikan secara internal.

Selain aktor negara, aktor non-negara memiliki peran signifikan dalam memperpanjang konflik. Kelompok seperti Al-Shabaab di Somalia, milisi lokal di Sudan Selatan, serta berbagai kelompok pemberontak di Ethiopia memainkan peran besar dalam menciptakan instabilitas. Aktor-aktor ini tidak hanya bergerak secara lokal, tetapi juga memiliki jaringan internasional, terutama dalam hal pendanaan dan ideologi. Di beberapa negara, hubungan antara pemerintah dan milisi bersifat ambigu, di mana kelompok tertentu terkadang digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Situasi ini menciptakan konflik yang kompleks karena batas antara aktor negara dan non-negara menjadi semakin kabur.

Tidak hanya faktor domestik, konflik di Afrika Timur juga dipengaruhi oleh dinamika regional dan internasional. Teori Regional Security Complex dari Buzan dan Wæver (2003) menjelaskan bahwa kawasan dengan interdependensi keamanan yang tinggi akan mengalami penyebaran konflik lintas batas. Hal ini tampak jelas pada hubungan Ethiopia–Eritrea, ketegangan Somalia–Kenya, serta arus pengungsi dari Sudan Selatan ke Uganda. Intervensi negara asing dan organisasi internasional semakin memperluas dimensi konflik. Seperti dijelaskan Williams (2019), kehadiran misi perdamaian internasional di Somalia menunjukkan bahwa konflik lokal dapat berubah menjadi isu keamanan global.

Pada akhirnya, konflik bersenjata di Afrika Timur tidak hanya berdampak pada stabilitas politik tetapi juga menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat besar. Jutaan orang harus mengungsi, ratusan ribu kehilangan nyawa, dan banyak negara mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dampak yang sangat luas ini menunjukkan bahwa konflik di

Afrika Timur bukan hanya masalah lokal, melainkan persoalan global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan memahami akar permasalahan dan dinamika yang melingkupinya, penelitian ini berupaya memberikan analisis mendalam mengenai penyebab dan pola perkembangan konflik di kawasan tersebut.

Keterlibatan organisasi regional juga tidak dapat diabaikan. Murithi (2017) menyoroti bahwa African Union (AU) dan Intergovernmental Authority on Development (IGAD) memiliki peran penting dalam memediasi konflik, meskipun efektivitasnya masih terbatas akibat minimnya kapasitas institusional dan pengaruh politik negara-negara besar. Keterbatasan ini membuat solusi konflik seringkali bersifat jangka pendek dan mudah runtuh ketika dinamika politik domestik kembali memanas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji faktor pemicu dan pola perkembangan konflik di Afrika Timur dengan pendekatan multidimensional melalui perspektif Hubungan Internasional

STUDI LITERATUR

Studi literatur mengenai konflik bersenjata di Afrika Timur telah berkembang luas, melibatkan analisis dari berbagai perspektif teori Hubungan Internasional, teori konflik, serta kajian politik kawasan. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa konflik di Afrika Timur tidak dapat dipisahkan dari kombinasi faktor struktural, historis, ekonomi, identitas, serta intervensi eksternal. Sejumlah literatur menekankan bahwa konflik kawasan ini tidak lagi berbentuk perang konvensional, melainkan telah berkembang menjadi konflik kompleks yang melibatkan aktor negara maupun non-negara dengan pola kekerasan yang berlapis (Kaldor, 2013).

Dalam tradisi realisme, Abbink (2022) dan Clapham (2017) menegaskan bahwa konflik di kawasan seperti Ethiopia, Somalia, dan Sudan Selatan bersumber dari perebutan kekuasaan dan kepentingan keamanan. Negara, milisi lokal, hingga aktor etnonasionalis berusaha mempertahankan posisinya dalam struktur politik yang rentan. Perspektif ini relevan terutama dalam konflik Tigray dan perang Ethiopia–Eritrea, yang memperlihatkan pentingnya dominasi militer dan strategi defensif dalam mempertahankan status politik. Realisme ofensif, seperti yang dijelaskan Mearsheimer (2001), semakin memperluas pemahaman ini karena menunjukkan bagaimana aktor tertentu berupaya memperluas pengaruh dan mengambil keuntungan dari lemahnya otoritas negara.

Berbeda dari realisme, perspektif liberal menekankan peran institusi internasional dan kerja sama regional. Murithi (2017) menyebut bahwa lemahnya kapasitas African Union (AU) dan IGAD menjadi faktor struktural yang membuat konflik sulit diselesaikan. Meski lembaga tersebut memiliki mandat untuk memediasi, minimnya kewenangan dan sumber daya menyebabkan mekanisme penyelesaian konflik tidak berjalan efektif. Keadaan ini diperburuk oleh rendahnya komitmen negara-negara anggota terhadap integrasi keamanan regional. Literatur liberal juga menyoroti bahwa keberlanjutan konflik terjadi karena ketiadaan kerangka tata kelola keamanan bersama yang mampu mencegah fragmentasi politik di kawasan.

Dari perspektif konstruktivisme, Johnson (2016), Woldemariam (2018), dan Markakis (2011) menunjukkan bahwa identitas etnis dan narasi sejarah menjadi faktor dominan dalam konflik Afrika Timur. Narasi mengenai hak historis, dendam sosial, serta memori kolektif digunakan oleh elite politik untuk memobilisasi dukungan dan mempertahankan kekuasaan. Contoh paling jelas adalah konflik antara Dinka dan Nuer di Sudan Selatan serta konflik antarkelompok di wilayah Oromia dan Tigray di Ethiopia. Literatur konstruktivis menegaskan bahwa konflik tidak dapat dipisahkan dari konstruksi sosial identitas yang dibentuk melalui sejarah panjang interaksi antar kelompok.

Selain itu, Failed State Theory atau teori negara lemah yang dikemukakan Rotberg (2004) sangat berpengaruh dalam menjelaskan konflik Somalia, Sudan Selatan, dan bagian besar Ethiopia. Negara yang kehilangan kapasitas untuk memberikan layanan publik, mengamankan wilayah, dan memonopoli kekerasan akan mengalami fragmentasi otoritas. Kondisi tersebut membuka ruang bagi milisi, warlord, dan kelompok etnis bersenjata mengisi kekosongan kekuasaan. Literatur kontemporer seperti Menkhaus (2014) menambahkan bahwa negara lemah di Afrika Timur bukan hanya gagal secara administratif, tetapi juga mengalami delegitimasi sosial di mata masyarakatnya.

Dalam kajian keamanan regional, teori Regional Security Complex Theory (RSCT) dari Buzan & Wæver (2003) memberikan kerangka analitis yang sangat relevan. Menurut teori ini, negara-negara Afrika Timur membentuk satu kompleks keamanan karena masalah keamanan mereka saling terkait. Arus senjata ilegal, pengungsi lintas negara, dan milisi yang bergerak bebas antarwilayah menjadikan konflik di satu negara dengan mudah menyebar ke negara lain. Literatur RSCT menunjukkan bahwa konflik Somalia berkaitan erat dengan stabilitas Kenya dan Ethiopia, sementara konflik Sudan Selatan berimplikasi pada keamanan Uganda dan Sudan.

Sejumlah literatur terbaru memperluas studi dengan menggunakan New Wars Theory (Kaldor, 2013), yang menjelaskan bahwa perang modern melibatkan aktor campuran, motivasi ekonomi, dan kekerasan yang ditujukan langsung kepada warga sipil. Penelitian oleh de Waal (2015) menunjukkan bahwa ekonomi perang, seperti perdagangan senjata, minyak, dan kayu ilegal, menjadi faktor yang mempertahankan konflik. Pendekatan ini menekankan bahwa konflik bukan hanya soal ideologi atau perebutan kekuasaan, tetapi juga mekanisme untuk mempertahankan keuntungan ekonomi kelompok tertentu.

Literatur mengenai human security juga semakin banyak digunakan untuk memahami konflik Afrika Timur. Doyle dan Sambanis (2016) menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan, kelaparan, migrasi paksa, dan runtuhnya sistem sosial merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam analisis konflik. Di wilayah Tigray dan Sudan Selatan, ancaman terhadap keamanan manusia jauh lebih besar dibandingkan ancaman militer tradisional. Perspektif ini mendorong kajian konflik untuk tidak hanya fokus pada aktor elite, tetapi juga pada dampaknya bagi masyarakat.

Akhirnya, literatur kontemporer menekankan pentingnya integrated conflict analysis, yang melihat konflik sebagai hasil interaksi antara faktor struktural, pemicu langsung, dinamika konflik, dan kepentingan aktor. Penelitian oleh Lemke (2020) dan Raleigh (2018) menunjukkan bahwa konflik yang melibatkan berbagai aktor akan berkembang menjadi lebih dinamis dan sukar diselesaikan jika tidak dianalisis secara holistik. Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami konflik Afrika Timur, yang sering kali memiliki dimensi identitas, politik, ekonomi, dan geopolitik yang saling berkaitan erat.

Dari seluruh literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik di Afrika Timur merupakan fenomena kompleks yang harus dianalisis melalui berbagai pendekatan teoretis. Setiap teori memberikan perspektif yang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk memahami struktur, dinamika, dan pola perkembangan konflik di kawasan ini. Dengan dasar studi literatur yang kuat, analisis empiris dan teoretis dalam jurnal ini menjadi lebih solid, komprehensif, dan selaras dengan perkembangan kajian Hubungan Internasional kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan karena fokus penelitian adalah memahami faktor pemicu dan pola perkembangan konflik

bersenjata di Afrika Timur melalui kajian teori dan sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian diperoleh dari literatur sekunder seperti buku akademik, artikel jurnal, laporan organisasi internasional, dan publikasi ilmiah yang membahas konflik di Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan, dan kawasan Afrika Timur secara umum. Sumber-sumber utama yang digunakan meliputi karya Abbink (2022), Clapham (2017), Johnson (2016), Rotberg (2004), Murithi (2017), Williams (2019), de Waal (2018), serta teori keamanan regional Buzan dan Wæver (2003). Semua literatur tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan tema konflik, teori Hubungan Internasional, serta dinamika keamanan kawasan.

Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis, yaitu membaca, memahami, dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema besar yang telah dirumuskan dalam studi literatur, seperti faktor politik, etnisitas, sumber daya alam, negara lemah, dan kompleks keamanan regional. Data dari berbagai sumber kemudian dibandingkan untuk menemukan pola hubungan dan memperkuat validitas temuan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan konflik Afrika Timur secara komprehensif sesuai teori realisme, liberalisme, konstruktivisme, failed state theory, dan regional security complex theory, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika konflik di kawasan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Konteks Historis Konflik Afrika Timur

Konflik bersenjata di Afrika Timur tidak dapat dijelaskan tanpa memahami konteks sejarah yang membentuk struktur sosial dan politik kawasan tersebut. Pemerintahan kolonial meninggalkan warisan berupa perbatasan yang dibentuk tanpa mempertimbangkan identitas etnis, bahasa, dan adat setempat. Ketidaksesuaian antara batas teritorial dan batas sosial ini menciptakan ketegangan berkepanjangan di negara-negara seperti Ethiopia, Somalia, dan Sudan. Sebagai contoh, suku Somali terpecah ke dalam lima wilayah administratif berbeda: Somalia, Ethiopia (Ogaden), Kenya (Northern Frontier District), Eritrea, dan Djibouti. Fragmentasi ini menjadi sumber konflik identitas yang berlangsung hingga kini.

Selain itu, pemerintahan kolonial juga menerapkan strategi divide et impera atau politik pecah-belah yang memperkuat konflik antar kelompok lokal. Kelompok tertentu diposisikan lebih dominan dalam struktur pemerintahan, sementara kelompok lain

dipinggirkan. Ketika pemerintahan kolonial berakhir, struktur sosial-politik yang tidak seimbang ini menciptakan kompetisi kekuasaan yang intens di negara-negara baru. Akibatnya, konflik pada periode pascakolonial tidak hanya dipicu oleh kepentingan politik, tetapi juga oleh upaya kelompok-kelompok lokal untuk menegosiasikan kembali identitas dan pengaruh mereka dalam negara baru.

2. Gambaran Umum Konflik Afrika Timur

Afrika Timur merupakan kawasan yang terus mengalami ketidakstabilan politik dan keamanan dalam jangka panjang. Negara-negara seperti Somalia, Ethiopia, Eritrea, Sudan, dan Sudan Selatan berulang kali terjebak dalam siklus konflik bersenjata yang sulit dihentikan. Di Somalia, runtuhnya pemerintahan pusat pada awal 1990-an melahirkan kekuasaan klan, perang saudara, dan munculnya kelompok militan seperti Al-Shabaab. Di Ethiopia, perubahan politik pasca-reformasi Abiy Ahmed justru memicu konflik besar antara pemerintah pusat dan Tigray People's Liberation Front (TPLF). Sementara Sudan Selatan, yang memperoleh kemerdekaan pada 2011, langsung terjerumus ke dalam perang saudara akibat ketegangan antara kelompok Dinka dan Nuer.

Konflik di Afrika Timur juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika kawasan. Perbatasan yang tidak stabil, arus pengungsi, serta perdagangan senjata ilegal membuat masalah keamanan di satu negara mudah menyebar ke negara lain. Karena itu, konflik di wilayah ini tidak lagi dapat dipahami sebagai konflik domestik semata, tetapi sebagai bagian dari dinamika keamanan regional yang kompleks. Keterlibatan aktor internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Turki serta kehadiran organisasi internasional seperti AU, PBB, dan IGAD menambah dimensi geopolitik dalam konflik di kawasan tersebut.

3. Dinamika Politik Domestik dan Krisis Legitimasi

Kemunculan dan perkembangan konflik bersenjata di Afrika Timur juga berkaitan erat dengan krisis legitimasi politik. Banyak negara di kawasan ini menghadapi pemerintahan yang tidak mampu mengakomodasi berbagai kepentingan etnis, agama, maupun regional. Pemerintah sering kali bergantung pada elite tertentu, sehingga kelompok lain merasa tereksklusi dari proses politik. Ketegangan ini memperbesar risiko

mobilisasi kekerasan.

Di Ethiopia, reformasi politik di bawah kepemimpinan Abiy Ahmed menciptakan harapan awal akan perubahan, tetapi juga menimbulkan pertentangan dari kelompok etnis yang merasa kehilangan kekuasaan. Konflik Tigray menjadi salah satu contoh bagaimana perubahan distribusi kekuasaan dapat memicu perang besar. Sementara itu, di Somalia, absennya pemerintah efektif sejak 1991 membuka ruang bagi klan-klan bersenjata untuk menguasai wilayah tertentu dan menjalankan pemerintahan sendiri.

Krisis legitimasi ini diperparah oleh pola pemerintahan yang otoriter dan korup. Banyak pemimpin mempertahankan kekuasaan melalui represi, manipulasi pemilu, dan pembatasan kebebasan politik. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, konflik bersenjata menjadi alternatif untuk menuntut perubahan.

4. Konflik Berbasis Identitas dan Fragmentasi Sosial

Identitas etnis merupakan faktor yang paling sering mempengaruhi dinamika konflik di Afrika Timur. Identitas tidak hanya menjadi penanda budaya, tetapi juga menjadi dasar pembentukan loyalitas politik. Di Sudan Selatan, konflik antara Dinka dan Nuer memperlihatkan bagaimana pertentangan identitas dapat berkembang menjadi perang saudara yang berkepanjangan. Konflik ini diperkuat oleh sejarah panjang ketidakpercayaan dan persaingan politik antar elite kedua kelompok.

Di Ethiopia, konflik antara etnis Amhara, Oromo, Tigrean, dan Afar menunjukkan bagaimana identitas etnis dapat berubah menjadi alat mobilisasi kekerasan ketika dikombinasikan dengan ketidakpuasan politik dan distribusi kekuasaan yang timpang. Dalam konteks Somalia, identitas klan memegang peran sangat dominan dalam struktur sosial. Klan seperti Hawiye, Darod, dan Dir memiliki milisi masing-masing dan sering terlibat dalam perang perebutan wilayah.

Identitas sering dipolitisasi oleh elite untuk mempertahankan kekuasaan. Ketika narasi “dendam lama”, “hak historis”, atau “pengkhianatan” digunakan untuk memobilisasi massa, konflik menjadi lebih emosional dan sulit diselesaikan.

5. Faktor Pemicu Konflik Bersenjata

a. Faktor Politik: Ketidakstabilan Kekuasaan dan Lemahnya Institusi Negara

Faktor politik merupakan pendorong utama konflik di Afrika Timur. Banyak negara di kawasan ini menghadapi krisis legitimasi politik akibat lemahnya institusi pemerintahan, minimnya akuntabilitas, serta sistem politik yang didominasi elite tertentu. Lemahnya institusi memungkinkan kelompok bersenjata menantang otoritas negara. Misalnya, kekosongan kekuasaan di Somalia setelah 1991 menciptakan ruang bagi milisi klan dan kelompok jihad tumbuh kuat. Di Ethiopia, reformasi politik yang dilakukan Abiy Ahmed membuka “ruang kompetisi baru” antar elite politik yang akhirnya memicu perang di Tigray.

Selain itu, pergantian kekuasaan sering kali tidak berlangsung secara demokratis. Transisi kekuasaan yang tidak stabil menjadi pemicu retaknya kesepakatan politik, seperti yang terjadi di Sudan setelah jatuhnya Omar al-Bashir pada 2019. Ketegangan politik ini kemudian diperparah oleh kelompok milisi yang memiliki akses senjata dan dukungan etnis. Dengan demikian, kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif menjadi faktor fundamental yang menyebabkan konflik muncul dan terus berlanjut.

b. Faktor Etnis dan Identitas: Warisan Historis yang Sulit terselesaikan

Konflik etnis merupakan ciri khas konflik Afrika Timur. Identitas etnis sering kali diwariskan secara turun-temurun dan digunakan sebagai sumber mobilisasi politik. Banyak kelompok etnis memiliki sejarah konflik panjang, seperti kelompok Dinka dan Nuer di Sudan Selatan, Amhara dan Tigray di Ethiopia, serta klan Hawiye dan Darod di Somalia. Para elite politik memanfaatkan identitas ini untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka, sehingga konflik etnis menjadi sulit untuk diselesaikan.

Identitas etnis juga diperkuat oleh narasi sejarah yang berbeda, sehingga memperluas kesenjangan sosial antar kelompok. Misalnya, kelompok Tigray memiliki sejarah panjang dalam memerintah Ethiopia, sementara kebijakan pemerintahan pusat dianggap merugikan kelompok tersebut. Pada tingkat lokal, perebutan wilayah adat atau sumber mata pencaharian sering memicu kekerasan antarkelompok. Karena identitas etnis sering terhubung dengan kepentingan politik

dan ekonomi, maka konflik jenis ini cenderung memiliki dimensi emosional dan simbolik yang sulit diatasi dengan pendekatan politik biasa.

c. Faktor Ekonomi dan Ketimpangan Sosial

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam memperburuk konflik bersenjata di Afrika Timur. Tingkat kemiskinan yang tinggi, ketergantungan pada sektor agraria, dan minimnya lapangan kerja menjadikan masyarakat rentan terhadap perekrutan kelompok milisi. Krisis pangan yang disebabkan kekeringan, perubahan iklim, maupun buruknya tata kelola pangan, semakin memperparah ketidakstabilan. Alex de Waal (2018) menjelaskan bahwa kelaparan sering kali disebabkan oleh keputusan politik yang buruk, dan kondisi ini sangat terlihat di beberapa negara Afrika Timur.

Ketimpangan ekonomi antarwilayah dan antaretnis juga menjadi pemicu konflik. Daerah yang merasa terpinggirkan cenderung membentuk kelompok bersenjata untuk menuntut hak politik dan ekonomi. Di Sudan Selatan, misalnya, ketimpangan distribusi pendapatan minyak antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu penyebab pecahnya perang saudara. Selain itu, adanya ekonomi ilegal seperti perdagangan batu mulia, kayu, dan senjata turut memperpanjang konflik karena menjadi sumber finansial kelompok milisi.

d. Perebutan Sumber Daya Alam: Minyak, Air, dan Lahan

Sumber daya alam menjadi faktor pemicu konflik yang sangat penting di Afrika Timur. Sudan Selatan, yang memiliki cadangan minyak terbesar di kawasan, berkali-kali terlibat konflik internal akibat perebutan pengelolaan ladang minyak. Di Somalia dan Ethiopia, perebutan sumber air dan lahan penggembalaan menyebabkan bentrokan antara kelompok pastoral.

Perubahan iklim mempersulit masalah ini. Kekeringan ekstrem menyebabkan perebutan sumber air semakin intens dan memicu konflik baru antara petani dan penggembala di Ethiopia, Kenya, dan Somalia. Ketika sumber daya alam sudah menjadi faktor kelangsungan hidup, konflik sering kali berubah menjadi kekerasan yang sulit dihentikan.

e. Campur Tangan Aktor Eksternal: Kepentingan Geopolitik Global

Konflik Afrika Timur tidak dapat dipahami tanpa melihat keterlibatan aktor

eksternal. Amerika Serikat, Uni Eropa, Turki, Uni Emirat Arab, dan bahkan Tiongkok memiliki kepentingan politik, ekonomi, maupun keamanan di kawasan ini. Intervensi mereka sering memperkuat salah satu pihak dan mendorong eskalasi konflik. Selain itu, kelompok teroris internasional seperti Al-Shabaab memanfaatkan lemahnya pengawasan perbatasan untuk memperluas jaringan dan mempengaruhi stabilitas kawasan.

Persaingan geopolitik global juga memainkan peran penting. Misalnya, Eritrea pernah dituduh mendukung kelompok militan di Somalia untuk melemahkan pengaruh Ethiopia. Sementara itu, kehadiran pangkalan militer asing di Djibouti menjadikan kawasan ini sebagai persaingan antara kekuatan global seperti AS, Tiongkok, dan Prancis. Dengan demikian, konflik bersenjata di Afrika Timur bukan hanya persoalan internal, tetapi juga bagian dari percaturan geopolitik global.

Afrika Timur berada di kawasan strategis yang menghubungkan Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Laut Merah dan Teluk Aden merupakan jalur penting perdagangan internasional, sehingga banyak negara besar memiliki kepentingan geopolitik di kawasan ini.

1) Persaingan Kekuatan Besar

Amerika Serikat berkepentingan mencegah berkembangnya organisasi teroris. Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi dan jalur perdagangan Belt and Road Initiative. Turki dan UEA memiliki kepentingan ekonomi, ideologis, dan militer.

2) Pangkalan Militer Asing

Djibouti menjadi contoh negara yang menampung pangkalan militer AS, Tiongkok, Prancis, dan Jepang. Keberadaan pangkalan ini menunjukkan tingginya persaingan global di kawasan.

3) Intervensi Politik dan Dukungan Milisi

Negara-negara seperti Eritrea, UEA, dan Turki memberikan dukungan militer kepada kelompok tertentu, memperpanjang konflik yang sedang berlangsung.

6. Spillover Konflik dan Kompleks Keamanan Regional

Konflik di kawasan Afrika Timur tidak hanya berdampak pada negara tempat konflik itu terjadi, tetapi juga menciptakan efek limpahan (spillover) yang mengganggu stabilitas kawasan secara keseluruhan. Dalam perspektif Regional Security Complex Theory (RSCT) yang dikembangkan Barry Buzan dan Ole Wæver, Afrika Timur termasuk dalam kawasan dengan interdependensi keamanan yang sangat tinggi. Artinya, ancaman keamanan di satu negara dengan mudah bergeser ke negara lain karena adanya hubungan geografis yang dekat, perbatasan yang lemah, struktur politik yang rapuh dan interaksi antarpemerintah yang tidak stabil. Oleh karena itu, konflik internal sering berubah menjadi masalah regional yang lebih luas, terutama melalui arus pengungsi, penyebaran senjata ilegal, dan operasi kelompok militan lintas negara.

a. Arus Pengungsi

Salah satu wujud paling nyata dari efek limpahan konflik adalah meningkatnya mobilitas pengungsi. Negara-negara seperti Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia menjadi penghasil pengungsi terbesar di kawasan akibat perang saudara, kekerasan etnis, dan instabilitas politik berkepanjangan.

1) Dampak Arus Pengungsi terhadap Negara Penerima

Arus yang sangat besar memberikan tekanan besar pada negara-negara tetangga seperti Uganda, Kenya, Ethiopia, dan Sudan. Uganda misalnya, menampung lebih dari dua juta pengungsi Sudan Selatan dan menjadi salah satu negara dengan populasi pengungsi tertinggi di dunia. Kondisi ini berdampak pada:

- Tekanan ekonomi dan infrastruktur, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman.
- Ketegangan sosial, karena kompetisi terhadap sumber daya lokal seperti tanah dan air.
- Perubahan dinamika demografis, terutama di wilayah perbatasan yang sebelumnya jarang penduduk.
- Ancaman stabilitas politik, ketika konflik yang dibawa pengungsi menjadi pemicu perselisihan antarkelompok etnis lokal.

2) Militerisasi Kamp Pengungsi

Dalam beberapa kasus, kamp pengungsi menjadi tempat rekrutmen milisi atau

pusat logistik bagi kelompok bersenjata dari negara asal. Misalnya:

- Di Ethiopia, kamp pengungsi Eritrea pernah digunakan untuk perekrutan pasukan anti-pemerintah Eritrea.
- Di Kenya, beberapa kamp Dadaab dilaporkan menjadi tempat persembunyian simpatisan Al-Shabaab.

Hal ini memperkuat risiko keamanan dan memperluas konflik lintas batas.

b. Perdagangan Senjata Ilegal

Perbatasan Afrika Timur yang luas dan sulit diawasi menciptakan jalur ideal bagi peredaran senjata ilegal. Perdagangan ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan pemerintah, korupsi aparat, serta banyaknya kelompok bersenjata yang beroperasi di pedalaman.

1) Penyebaran Senjata

Senjata dari Libya pasca-keruntuhan rezim Gaddafi menjadi salah satu sumber utama yang mengalir ke Afrika Timur dan Afrika Tengah. Jalur penyebaran umumnya melalui:

- Sudan dan Chad menuju Sudan Selatan,
- Kenya dan Somalia melalui Jalur Mendera,
- Ethiopia melalui wilayah Afar dan Ogaden.

2) Dampak Peredaran Senjata terhadap Stabilitas Regional

Perdagangan senjata meningkatkan kekuatan dan daya serang milisi serta memperpanjang konflik. Senjata ringan seperti AK-47 dan RPG menjadi alat utama kelompok pemberontak untuk mempertahankan basis kekuatan mereka. Selain itu:

- Kelompok kriminal lokal menjadi semakin kuat.
- Pemerintah kehilangan monopoli kekuasaan atas alat-alat kekerasan.
- Konflik kecil dapat dengan cepat meningkat menjadi perang bersenjata.

3) Kelompok Militan Lintas Negara

Keberadaan kelompok militan lintas batas menjadi faktor signifikan dalam memperparah dinamika keamanan kawasan. Kelompok tersebut memanfaatkan lemahnya perbatasan untuk berlindung, merekrut anggota, mengatur suplai

logistik, atau melancarkan serangan.

- **Al-Shabaab**

Al-Shabaab adalah contoh paling menonjol. Berbasis di Somalia, kelompok ini sering melakukan serangan di Kenya, terutama di wilayah Mandera, Garissa, dan pesisir Lamu. Mereka memanfaatkan poros Somalia–Kenya yang rawan untuk: Serangan lintas batas terhadap penduduk sipil dan aparat keamanan, Rekrutmen anggota dari komunitas pesisir Kenya, dan Pengumpulan dana melalui penyelundupan dan pemerasan.

- **Milisi Ethiopia dan Sudan**

Konflik antara Ethiopia dan Sudan di wilayah perbatasan al-Fashaga melibatkan berbagai milisi lokal. Meskipun bukan organisasi internasional, milisi ini kerap bergerak bebas melampaui batas negara, menyebabkan: Ketegangan diplomatik berkepanjangan, Bentrokan antara militer kedua negara, dan Pengungsian massal warga desa perbatasan.

- **Kelompok Bersenjata Sudan Selatan**

Dalam konteks Sudan Selatan, berbagai faksi milisi yang loyal pada pemimpin etnis tertentu sering melintasi perbatasan menuju Uganda, Republik Demokratik Kongo, dan Ethiopia untuk: Melarikan diri dari operasi militer, Membangun basis penyerangan baru, dan Mencari suplai logistik dari jaringan kriminal regional.

7. Analisis Konflik Per Negara

Konflik di Afrika Timur memiliki karakteristik yang beragam tetapi saling terkait. Masing-masing negara memiliki dinamika internal yang unik, namun faktor geografis, ekonomi, dan politik menjadikan konflik tersebut berpengaruh pada stabilitas kawasan. Berikut analisis mendalam per negara.

a. Somalia

Somalia menjadi salah satu contoh paling ekstrim dari state collapse di Afrika. Sejak runtuhnya rezim Siad Barre pada 1991, negara ini mengalami kekosongan otoritas politik dan institusi, memicu perang antar-klan, kebangkitan kelompok militan, dan perang saudara berkepanjangan.

- **Runtuhnya Negara (State Collapse)**

Runtuhnya negara ditandai dengan:

- hilangnya pemerintah pusat yang mampu mengendalikan seluruh wilayah,
- fragmentasi otoritas menjadi wilayah-wilayah berbasis klan,
- munculnya pemerintahan regional de facto seperti Somaliland dan Puntland,
- tidak adanya kontrol negara terhadap ekonomi, pelabuhan, dan bea cukai.

State collapse membuat Somalia menjadi ruang kosong kekuasaan yang memancing masuknya kelompok militan dan aktor internasional.

- Peran Al-Shabaab

Al-Shabaab muncul pada awal 2000-an sebagai sayap radikal dari Islamic Courts Union (ICU). Seiring waktu, kelompok ini berubah menjadi organisasi jihad transnasional yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Peran Al-Shabaab meliputi:

- menguasai sebagian besar wilayah selatan Somalia,
- melakukan serangan teror di Somalia dan Kenya,
- mengontrol perdagangan arang ilegal yang bernilai jutaan dolar,
- memanfaatkan kemiskinan dan ketiadaan negara untuk rekrutmen anggota.

Operasi militer Uni Afrika (AMISOM) dan pasukan Somalia berhasil melemahkan mereka, tetapi Al-Shabaab masih menjadi ancaman regional yang signifikan.

- Klan sebagai Basis Politik

Politik Somalia dibangun atas struktur klan yang kuat seperti Hawiye, Darod, Dir, dan Rahanweyn. Konflik sering dipicu oleh:

- perebutan wilayah dan sumber daya,
- pertarungan untuk menguasai pelabuhan,
- persaingan internal klan untuk posisi pemerintahan.

Sistem kuota 4.5 yang digunakan Somalia untuk pembagian kursi parlemen menunjukkan bahwa klan tetap menentukan dinamika politik negara tersebut.

- Perang Perebutan Mogadishu

Ibu kota Mogadishu menjadi simbol kekuasaan. Pertempuran perebutan kota terjadi antara:

- faksi milisi klan,
- warlord yang didukung negara asing,
- Al-Shabaab vs pemerintah transisi Somalia,
- AMISOM melawan jaringan teror.

b. Ethiopia

Sebagai negara terbesar kedua di Afrika berdasarkan populasi, Ethiopia menghadapi konflik internal akibat sistem federalisme etnis, kesenjangan antar-kelompok, serta perebutan kekuasaan politik.

- **Konflik Tigray**

Konflik Tigray (2020–2022) merupakan salah satu perang paling mematikan di abad ke-21. Pertempuran terjadi antara:

- pemerintah pusat Ethiopia di bawah PM Abiy Ahmed,
- Tigray People's Liberation Front (TPLF).

Konflik memicu:

- ratusan ribu korban jiwa,
- kelaparan massal akibat blokade,
- keterlibatan Eritrea yang memperburuk situasi,
- pengungsian besar-besaran ke Sudan.

Perang Tigray memperlihatkan rapuhnya integrasi nasional Ethiopia.

- **Ketegangan Amhara–Oromo**

Etnis Oromo dan Amhara adalah dua kelompok terbesar di Ethiopia, namun hubungan keduanya penuh ketegangan akibat:

- perebutan wilayah historis termasuk daerah Wollega dan Raya,
- persaingan politik antara kelompok elit Amhara dan Oromo,
- meningkatnya kelompok bersenjata Oromo Liberation Army (OLA).

Ketegangan ini menciptakan bentrokan etnis yang meluas dan mengancam stabilitas nasional.

- **Dampak Federalisme Etnis**

Sistem federalisme etnis diperkenalkan oleh TPLF pada 1990-an. Dampaknya:

- memberikan otonomi besar namun juga memperkuat identitas etnis,
- memicu tuntutan pemisahan diri di wilayah seperti Tigray dan Sidama,

- memicu konflik demarkasi perbatasan antar-regional,
- menjadikan politik nasional terfragmentasi.

Federalisme etnis yang tidak dikelola dengan baik membuka ruang bagi konflik sistemik antar-kelompok.

c. Sudan dan Sudan Selatan

Kedua negara ini berbagi sejarah panjang kekerasan, perpecahan politik, dan konflik identitas. Setelah referendum 2011, Sudan Selatan merdeka, tetapi konflik baru segera muncul.

- Perang Saudara

Sudan mengalami dua perang saudara besar (1955–1972 dan 1983–2005). Sudan Selatan pun jatuh dalam perang saudara baru sejak 2013, dipicu perselisihan antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar.

Dampaknya:

- ratusan ribu kematian,
- kehancuran ekonomi,
- krisis kemanusiaan besar.

- Perebutan Ladang Minyak

Minyak menjadi inti konflik Sudan–Sudan Selatan. Permasalahan meliputi:

- ladang minyak berada di Sudan Selatan, tetapi pipa ekspor berada di Sudan,
- perselisihan tarif pipa,
- perebutan wilayah Abyei yang kaya minyak,
- keterlibatan milisi lokal untuk menguasai sumur minyak.

Minyak memicu ketegangan geopolitik yang menjalar ke hubungan regional.

- Konflik Etnis Dinka–Nuer

Konflik antara Dinka dan Nuer memiliki akar panjang:

- persaingan penggembalaan,
- pembalasan dendam akibat kekerasan antarkelompok,
- rivalitas politik antara Kiir (Dinka) dan Machar (Nuer).

Konflik etnis ini memperparah perang saudara Sudan Selatan dan memicu perpindahan penduduk dalam jumlah besar ke Uganda dan Ethiopia.

d. Eritrea

Eritrea adalah salah satu negara paling tertutup di dunia, sering disebut “Korea Utara-nya Afrika.” Negara ini mempraktikkan militerisasi ekstrem yang mempengaruhi stabilitas regional.

- **Militerisasi Ekstrem**

Pemerintah Eritrea menerapkan wajib militer seumur hidup, yang sering dianggap sebagai bentuk kerja paksa. Dampaknya:

- eksodus warga Eritrea ke Eropa dan Ethiopia,
- ekonomi lumpuh karena tenaga kerja terserap ke militer,
- meningkatnya ketegangan dengan negara tetangga.

- **Penjara Politik dan Rezim Represif**

Pemerintahan Presiden Isaias Afwerki dikenal represif:

- penahanan jurnalis dan oposisi tanpa pengadilan,
- kebebasan media dan politik sangat terbatas,
- pengawasan ketat terhadap aktivitas warga.

Kondisi ini menciptakan arus pengungsi besar yang turut memengaruhi dinamika kawasan.

- **Perang dengan Ethiopia**

Perang Ethiopia–Eritrea (1998–2000) menjadi salah satu konflik antarnegara paling mematikan di Afrika modern. Dampaknya:

- tewasnya lebih dari 70.000 orang,
- perbatasan tetap tegang selama dua dekade,
- Eritrea mendukung kelompok pemberontak Ethiopia,
- Ethiopia mendukung oposisi Eritrea.

Meskipun perdamaian 2018 memperbaiki hubungan, konflik Tigray kembali menarik Eritrea ke dalam perang.

e. Kenya dan Uganda

Kedua negara ini relatif stabil dibanding tetangganya, namun tetap mengalami efek spillover dari konflik kawasan, terutama dari Somalia.

- **Spillover Al-Shabaab**

Al-Shabaab melakukan berbagai serangan di Kenya dan Uganda sebagai

balasan atas keterlibatan kedua negara dalam misi militer di Somalia. Contoh besar:

- Serangan Westgate Mall (2013) di Nairobi,
- Serangan Universitas Garissa (2015),
- pengeboman di Kampala (2010).

Serangan ini memperlemah pariwisata dan investasi, serta meningkatkan ketegangan etnis dan keagamaan.

- **Militer Kenya dan Uganda di Somalia**

Keterlibatan militer Kenya (KDF) dan Uganda (UPDF) melalui AMISOM/ATMIS memiliki dampak:

- membantu merebut kota-kota penting dari Al-Shabaab,
- meningkatkan hubungan diplomatik dengan pemerintah Somalia,
- tetapi juga menimbulkan kemarahan lokal dan menjadi alasan Al-Shabaab melakukan serangan balasan.

Kenya dan Uganda menghadapi dilema antara menjaga keamanannya sendiri dan menangani risiko keterlibatan dalam konflik Somalia.

8. Pola Perkembangan Konflik di Afrika Timur

a. Pola Historis: Warisan Kolonial dan Fragmentasi Negara

Banyak konflik di Afrika Timur berakar pada sejarah kolonial. Penetapan batas negara yang tidak mempertimbangkan identitas etnis menciptakan negara-negara yang rapuh secara sosial. Fragmentasi identitas dan ketidakmampuan pemerintah membangun integrasi nasional menyebabkan konflik mudah muncul ketika terjadi perubahan politik.

b. Pola Kontemporer: Munculnya Aktor Non-Negara dan Perang Asimetris

Konflik saat ini semakin melibatkan aktor non-negara seperti kelompok milisi, klan, kelompok separatis, dan organisasi teroris. Mereka menjalankan strategi perang asimetris, seperti serangan mendadak, terorisme, dan penyerangan terhadap warga sipil. Perkembangan teknologi digital juga mempercepat penyebaran propaganda, mobilisasi massa, dan perekrutan anggota baru.

c. Pola Regional: Konflik Lintas Batas dan Spillover yang Sulit Dikendalikan

Konflik di satu negara dapat dengan cepat mempengaruhi negara lain. Arus pengungsi dari Somalia ke Kenya, dari Ethiopia ke Sudan, atau dari Sudan Selatan ke Uganda telah menciptakan ketegangan baru. Perdagangan senjata ilegal dan penyelundupan manusia menjadi isu keamanan regional yang sulit dikendalikan. Penyebaran konflik ini menciptakan apa yang disebut Buzan sebagai regional security complex, yaitu kondisi ketika keamanan negara-negara saling berkaitan erat.

9. Analisis Konflik Menggunakan Teori Hubungan Internasional

Analisis konflik di Afrika Timur tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori Hubungan Internasional yang melihat konflik sebagai hasil interaksi berbagai aktor, struktur politik, dinamika identitas, dan lingkungan regional. Menggunakan pendekatan multi-teori memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyebab dan pola konflik, karena setiap teori menyoroti aspek yang berbeda dari fenomena tersebut. Kerangka teoretis yang digunakan—realisme, liberalisme, dan konstruktivisme—secara bersama-sama membantu menjelaskan bagaimana kepentingan kekuasaan, peran institusi, serta konstruksi identitas berkontribusi terhadap dinamika konflik di kawasan Afrika Timur.

a. Perspektif Realistis

Dari perspektif realisme, konflik bersenjata muncul akibat perebutan kekuasaan dan upaya aktor untuk mempertahankan keamanan. Realisme memandang bahwa negara maupun kelompok bersenjata bertindak berdasarkan kepentingan strategis untuk mempertahankan posisi dominan dan mengurangi ancaman dari aktor lain. Hal ini sangat terlihat pada konflik Ethiopia–Eritrea, di mana kedua negara berusaha mempertahankan kontrol atas wilayah perbatasan yang dianggap strategis. Persaingan tersebut tidak hanya mencerminkan konflik teritorial, tetapi juga persaingan politik dan militer untuk mempertahankan status sebagai kekuatan regional.

Dalam konteks Somalia, persaingan antar klan memperlihatkan bagaimana kelompok non-negara juga dapat menjadi aktor realis yang mengejar power untuk

menguasai wilayah dan sumber daya. Klan-klan seperti Hawiye dan Darod membentuk milisi masing-masing untuk mempertahankan pengaruh mereka di wilayah tertentu. Di Sudan Selatan, perebutan ladang minyak antara elite politik dan kelompok etnis menunjukkan bagaimana sumber daya strategis menjadi faktor perebutan kekuasaan. Konflik yang terjadi bukan hanya akibat perbedaan identitas, tetapi juga karena upaya untuk menguasai aset ekonomi yang sangat penting bagi kelangsungan kekuasaan suatu kelompok. Dengan demikian, realisme menjelaskan bagaimana konflik Afrika Timur sangat dipengaruhi oleh kalkulasi kekuatan dan kepentingan keamanan.

b. Perspektif Liberalis

Berbeda dengan realisme, liberalisme melihat bahwa penyelesaian konflik sangat bergantung pada kemampuan institusi internasional dan mekanisme kerja sama untuk menciptakan stabilitas. Namun, dalam kasus Afrika Timur, liberalisme membantu menjelaskan mengapa konflik sulit dihentikan—yakni karena lemahnya institusi regional seperti African Union (AU) dan Intergovernmental Authority on Development (IGAD). Kedua institusi tersebut memiliki mandat untuk mencegah konflik dan melakukan mediasi, tetapi sering tidak mampu menegakkan keputusan politik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan politik anggota, dan perbedaan kepentingan antarnegara.

Dalam konflik Somalia, misi penjaga perdamaian seperti AMISOM yang didukung AU telah berhasil memberikan stabilitas terbatas di beberapa wilayah, tetapi tetap menghadapi perlawanan kuat dari kelompok militan seperti Al-Shabaab. Sementara dalam konflik Ethiopia–Tigray, upaya mediasi internasional sering terhambat oleh minimnya akses, rendahnya kepercayaan antar pihak, serta kepentingan strategis negara-negara tetangga yang berbeda-beda. Bahkan dalam konflik Sudan Selatan, IGAD telah memfasilitasi beberapa perjanjian damai, tetapi kurangnya mekanisme penegakan membuat perjanjian tersebut mudah dilanggar. Dengan demikian, perspektif liberalis membantu memahami bahwa konflik berkepanjangan di Afrika Timur juga disebabkan oleh kegagalan institusi regional dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan dan efektif.

c. Perspektif Konstruktivis

Konstruktivisme memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai bagaimana identitas, narasi sejarah, dan persepsi antarkelompok memainkan peran penting dalam membentuk dinamika konflik. Teori ini menekankan bahwa perilaku aktor tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan material, tetapi juga oleh keyakinan sosial dan identitas kolektif yang mereka miliki. Dalam konteks Afrika Timur, konflik antar kelompok Dinka dan Nuer di Sudan Selatan merupakan contoh nyata bagaimana identitas etnis membentuk konflik yang berkepanjangan. Narasi tentang ketidakadilan historis, perbedaan budaya, dan persaingan antarpemimpin etnis semakin memperkuat ketegangan.

Dalam konflik Ethiopia–Tigray, memori historis tentang masa lalu kejayaan Tigray dan peran mereka dalam pemerintahan Ethiopia turut menciptakan identitas politik yang kuat dan rasa tidak percaya terhadap pemerintah pusat. Hal ini membuat konflik tidak hanya sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga pertentangan ideologis dan sosial yang berorientasi pada identitas kolektif. Konstruktivisme juga menjelaskan mengapa beberapa konflik tetap berlangsung meskipun faktor politik atau ekonomi telah berubah—karena narasi identitas tetap tertanam dalam masyarakat. Dengan demikian, teori ini menunjukkan bagaimana nilai, simbol, dan sejarah dapat memperpanjang konflik di Afrika Timur meskipun secara material situasi telah berubah.

d. Realisme Ofensif

Realisme ofensif, sebagaimana dikembangkan oleh John Mearsheimer, mengasumsikan bahwa negara (dan aktor kuat lainnya) tidak hanya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga berusaha memperluasnya secara agresif ketika muncul peluang. Dalam konteks Afrika Timur, teori ini menjelaskan perilaku negara atau kelompok bersenjata yang mengambil langkah ekspansif untuk memperkuat posisi mereka.

Sebagai contoh, konflik Ethiopia–Eritrea tidak hanya dipicu oleh perebutan wilayah perbatasan, tetapi juga keinginan masing-masing negara untuk menunjukkan dominasi politik regional. Ethiopia, sebagai negara terbesar dan

populasi terbesar di kawasan, memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan utama Afrika Timur. Eritrea di sisi lain mengembangkan kebijakan nasional yang sangat terpusat dan militeristik untuk bertahan hidup dalam lingkungan regional yang dianggap penuh ancaman.

Di Somalia, milisi seperti Al-Shabaab menunjukkan karakter realisme ofensif melalui upaya mereka memperluas wilayah kekuasaan dari satu provinsi ke provinsi lain, memanfaatkan lemahnya pemerintah pusat sebagai peluang ekspansi. Pola yang sama terlihat dalam konflik Sudan Selatan, ketika berbagai faksi bersenjata berusaha memperluas wilayah kendali mereka untuk menguasai sumber daya minyak.

Realisme ofensif membantu menjelaskan mengapa konflik di Afrika Timur cenderung bersifat agresif, ekspansif, dan berlangsung lama karena setiap aktor berusaha meningkatkan kekuatan relatifnya.

e. Human Security

Konsep human security (keamanan manusia) dikembangkan oleh UNDP dan menekankan bahwa keamanan bukan hanya soal pertahanan negara, tetapi menyangkut keselamatan individu dari berbagai ancaman seperti kemiskinan, kelaparan, kekerasan, penyakit, dan kehilangan tempat tinggal.

Konflik Afrika Timur menjadi contoh jelas bagaimana ancaman keamanan manusia jauh lebih besar daripada sekadar ancaman militer.

1) Krisis kemanusiaan

Konflik di Somalia, Ethiopia, dan Sudan Selatan menyebabkan jutaan orang mengungsi. Warga sipil sering terjebak di tengah baku tembak dan menjadi korban kekerasan.

2) Kelaparan sebagai senjata perang

Seperti dijelaskan de Waal, kelaparan sering menjadi alat politik. Di Tigray, blokade bantuan kemanusiaan memperburuk kondisi masyarakat.

3) Hancurnya akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi

Perang menyebabkan anak-anak tidak sekolah, fasilitas kesehatan rusak, dan perekonomian runtuh.

4) Kekerasan berbasis gender

Dalam banyak konflik, perempuan dan anak-anak menjadi korban pelecehan, perbudakan seksual, dan eksploitasi.

Pendekatan human security mengingatkan bahwa tujuan akhir penyelesaian konflik seharusnya bukan hanya menghentikan pertempuran, tetapi memulihkan kehidupan masyarakat.

Konflik bersenjata di Afrika Timur merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor atau satu teori saja. Pembahasan menunjukkan bahwa akar konflik muncul dari perpaduan antara sejarah kolonial yang memecah identitas lokal, fragmen politik internal, distribusi ekonomi yang timpang, dinamika identitas, dan kepentingan geopolitik global. Semua faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan kondisi konflik yang terus berulang dari generasi ke generasi.

Sejarah kolonial berperan menciptakan struktur negara yang rapuh karena batas-batas geografi tidak selaras dengan batas-batas identitas sosial. Hal ini menyebabkan munculnya negara-negara yang sulit membangun integrasi nasional. Setelah kemerdekaan, negara menghadapi tuntutan persaingan kekuasaan dari kelompok etnis dan elite lokal yang ingin mendapatkan posisi dalam sistem politik. Kegagalan negara dalam membangun birokrasi yang kuat dan inklusif membuat konflik semakin mudah muncul.

Di sisi lain, pembahasan menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan pendorong signifikan. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, dan persaingan atas sumber daya seperti minyak, akses air, dan lahan subur memperburuk ketegangan sosial. Ketika sumber daya alam menjadi alat politik, konflik pun memasuki dimensi ekonomi perang (war economy) yang sulit diputus karena memberikan keuntungan bagi aktor-aktor tertentu. Kondisi ini semakin diperparah dengan perubahan iklim yang memaksa perpindahan komunitas pastoral dan meningkatkan bentrokan antara kelompok penduduk.

Pembahasan juga memperlihatkan bahwa identitas dan memori sejarah memainkan peran utama dalam memperpanjang konflik. Narasi historis tentang pengkhianatan, dominasi etnis tertentu, atau ketidakadilan masa lalu digunakan sebagai alat mobilisasi oleh elite politik. Konstruksi identitas ini tidak hanya memicu konflik, tetapi juga menguatkan siklus kebencian antarkelompok. Ketika identitas menjadi

sumber legitimasi politik, konflik menjadi lebih emosional dan sulit diselesaikan.

Tidak kalah penting adalah peran aktor eksternal. Afrika Timur memiliki posisi geopolitik strategis karena kedekatannya dengan Laut Merah dan Teluk Aden, dua jalur perdagangan internasional utama. Akibatnya, kekuatan global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, Turki, dan negara Teluk memiliki kepentingan yang tumpang tindih di kawasan ini. Intervensi eksternal menciptakan dinamika yang rumit karena sering kali memperkuat salah satu pihak dalam konflik dan menambah ketegangan regional. Selain itu, kehadiran pangkalan militer asing mencerminkan bagaimana kawasan ini menjadi arena persaingan kekuatan global.

Secara regional, konflik Afrika Timur memiliki karakter spillover atau menyebar antarnegara. Batas-batas negara yang longgar, arus pengungsi, perdagangan senjata ilegal, dan kelompok milisi yang beroperasi lintas negara menjadikan masalah keamanan antarnegara saling terkait erat. Teori Regional Security Complex dari Buzan menunjukkan bahwa keamanan di kawasan ini tidak dapat dipahami secara individual, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang memiliki keterkaitan erat.

Akhirnya, pembahasan menunjukkan bahwa teori Hubungan Internasional memberikan kerangka analitis yang sangat berguna. Realisme menjelaskan perebutan kekuasaan dan keamanan. Liberalisme menjelaskan lemahnya institusi regional dan kegagalan kerja sama antarnegara. Konstruktivisme menjelaskan peran identitas dan narasi sejarah. Teori negara lemah menjelaskan kelemahan institusi internal. New wars theory dan human security menyoroti perubahan bentuk konflik dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan menggabungkan seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik Afrika Timur adalah fenomena kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensi dan multilevel, baik dalam analisis maupun penyelesaian.

KESIMPULAN

Konflik bersenjata di Afrika Timur merupakan fenomena multidimensional yang berakar pada perpaduan faktor sejarah, politik, ekonomi, identitas, serta dinamika regional dan internasional. Pembahasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun faktor tunggal yang dapat menjelaskan muncul dan berkembangnya konflik; sebaliknya, konflik

bersifat berlapis dan saling berinteraksi. Warisan kolonial berupa batas-batas teritorial yang tidak sesuai dengan struktur sosial telah menciptakan negara-negara yang rapuh secara internal dan sulit membangun integrasi nasional. Ketika negara gagal menyediakan layanan dasar, menjaga keamanan, atau memonopoli penggunaan kekuatan, ruang kosong kekuasaan diisi oleh milisi lokal, kelompok etnis bersenjata, hingga organisasi ekstremis seperti Al-Shabaab.

Faktor politik juga berperan kuat dalam memperburuk dinamika konflik. Sistem pemerintahan yang tidak inklusif, korupsi, perebutan kekuasaan elite, serta reformasi politik yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan meningkatnya ketegangan antar kelompok. Konflik di Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan, dan Eritrea memperlihatkan bagaimana negara yang tidak mampu membangun legitimasi stabil akan mudah terjerumus ke perang saudara. Kondisi ini diperparah oleh polarisasi identitas, di mana etnisitas, klan, atau narasi sejarah dijadikan dasar mobilisasi massa menuju kekerasan.

Selain itu, faktor ekonomi memainkan peran penting dalam memperpanjang konflik. Ketimpangan pendapatan, kelangkaan sumber daya seperti minyak, air, dan lahan, serta keberadaan ekonomi ilegal menjadi faktor pemicu utama. Persaingan untuk menguasai sumber daya strategis menyebabkan konflik semakin sulit dihentikan karena munculnya war economy yang menguntungkan aktor tertentu. Perubahan iklim yang meningkatkan kekeringan dan migrasi pastoral juga turut memperburuk tensi antar komunitas lokal.

Konteks regional dan internasional semakin memperumit situasi. Afrika Timur adalah bagian dari Regional Security Complex, di mana keamanan satu negara secara langsung memengaruhi negara lainnya. Arus pengungsi, penyebaran senjata ilegal, dan aktivitas kelompok militan lintas negara menjadi bukti nyata bahwa konflik mudah menyebar melewati batas geografis. Intervensi negara besar dan organisasi internasional juga memberikan dampak ganda: di satu sisi membantu stabilisasi, tetapi di sisi lain mempertajam persaingan geopolitik.

Analisis teoretis dalam jurnal ini menunjukkan bahwa realisme, liberalisme, dan konstruktivisme memberikan penjelasan komplementer. Realisme menjelaskan persaingan kekuasaan, liberalisme menyoroti kelemahan institusi regional, sedangkan konstruktivisme membahas peran identitas dan narasi sosial dalam memperpanjang konflik. Ketiga perspektif ini, ditambah teori negara gagal dan kompleks keamanan regional, memperlihatkan bahwa konflik Afrika Timur hanya dapat dipahami secara menyeluruh melalui pendekatan multi-level dan multidisipliner.

Secara keseluruhan, konflik di Afrika Timur bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga isu keamanan regional dan internasional. Penyelesaiannya membutuhkan kombinasi penguatan negara, reformasi politik inklusif, manajemen sumber daya yang adil, serta kerja sama keamanan regional yang lebih efektif. Tanpa intervensi komprehensif, kawasan ini berisiko terus berada dalam siklus konflik berkepanjangan yang menghambat stabilitas dan pembangunan jangka panjang.

REFERENSI

- Abbink, Jon. 2022. *The Tigray Conflict in Ethiopia: Origins, Dynamics, and Consequences*. African Affairs.
- Buzan, Barry, and Ole Wæver. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge University Press.
- Clapham, Christopher. 2017. *The Horn of Africa: State Formation and Decay*. Hurst & Co.
- de Waal, Alex. 2015. *The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power*. Polity Press.
- de Waal, Alex. 2018. *Mass Starvation: The History and Future of Famine*. Polity Press.
- Doyle, Michael W., & Sambanis, Nicholas. 2016. *Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations*. Princeton University Press.
- Johnson, Douglas H. 2016. *South Sudan: A New History for a New Nation*. Ohio University Press.
- Kaldor, Mary. 2013. *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. Stanford University Press.
- Markakis, John. 2011. *Ethiopia: The Last Two Frontiers*. James Currey.
- Mearsheimer, John J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. W.W. Norton.
- Menkhaus, Ken. 2014. "State Failure, State Building, and Prospects for a 'Functional Failed State' in Somalia." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*.
- Murithi, Tim. 2017. "The African Union and Regional Peacekeeping." *Journal of African Studies*.
- Raleigh, Clionadh. 2018. "The Geography of Conflict in Africa." *African Affairs*.
- Rotberg, Robert I. 2004. *When States Fail: Causes and Consequences*. Princeton University Press.
- Woldemariam, Michael. 2018. *Insurgent Fragmentation in the Horn of Africa: Rebellion and Its Discontents*. Cambridge University Press.
- Williams, Paul D. 2019. *Fighting for Peace in Somalia: A History and Analysis of the African Union Mission*. Oxford University Press.